

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN
KARAWANG**

Author

Dipha Rizka Humaira

Affiliation

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

Email

dipharizka03@gmail.com

Received: Oktober, 10, 2022

Revised: Nov 23, 2022

Accepted: Nov 24, 2022

Available Online: Des 01, 2022

Corresponding author

Dipha Rizka Humaira

Universitas Singaperbangsa Karawang

dipharizka03@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Akan tetapi, ada permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam hal ini yaitu, kurangnya sosialisasi pemerintah desa sehingga minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Purwasari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Tahap seleksi lokasi, pemerintah desa sudah baik dalam proses pemilihan telah melalui tiga tahapan yaitu melalui bidang usaha bumdes, melalui musyawarah khusus internal desa, dan musyawarah khusus. Tahap sosialisasi, pemerintah desa kurang optimal karena sebagian masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa purwasari. Tahap proses pemberdayaan, pemerintah desa cukup optimal karena pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana berupa posyandu, balai musyawarah ataupun Gedung serbaguna. Tahap pemandirian, pemerintah desa sudah baik karena membina masyarakatnya untuk mengembangkan kembali dan menyalurkan hasil dari pemberdayaan tersebut melalui perusahaan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat

ABSTRACT

Community empowerment is a process of providing power, strength, support and encouragement to the community so that they can develop their potential. However, there are problems faced by the community in this regard, namely, the lack of socialization of the village government so that the lack of community knowledge in terms of empowerment. This study

aims to find out the role of the village government in empowering the people in Purwasari Village, Purwasari District, Purwasari District. This research uses a qualitative approach that is descriptive in nature. Data were analyzed through interview techniques, documentation and direct field observation. The results of this study indicate that community participation in BUMDes activities is still lacking because the community's knowledge of the BUMDes program is still small. In the location selection stage, the village government has been good in the selection process. It has gone through three stages, namely through the village-owned business sector, through special internal village meetings, and special meetings. In the socialization stage, the village government was not optimal because some people did not feel that the socialization was being held by the Purwasari village government. In the empowerment process stage, the village government is quite optimal because the government collaborates with private companies through the Corporate Social Responsibility (CSR) program to conduct training, facilities, infrastructure in the form of posyandu, meeting halls or multipurpose buildings. In the self-sufficiency stage, the village government is already good because it fosters its community to redevelop and channel the results of this empowerment through the company.

Keywords: *Role of Village Government, Empowerment, Community*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Sejahtera secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum (Widiastuti, 2015:37).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan

yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto (dalam Widiastuti, 2015:39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal - usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif

dan kokoh. Pembangunan desa bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Melihat berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. Tampak bahwa persentase kemiskinan perdesaan masih lebih besar dari perkotaan. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, penulis bertujuan untuk meneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Purwasari.

METODE

Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai, semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru maka pembelajaran akan semakin baik. Metode berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sudjana (2005: 76) berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik (Muhadjir, 1996: 243).

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Fokus penelitian menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Oleh Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013: 125-127) yang terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari Tahap Seleksi Lokasi, Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Tahap Pemberdayaan Masyarakat, dan yang terakhir Tahap Pemandirian Masyarakat, teori tersebut antara lain :

1. Tahap Seleksi lokasi Fokus penelitian yang diambil dari indicator seleksi lokasi mengacu pada tempat yang dipilih memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga pentingnya kesadaran terhadap potensi sumber daya alam yang telah tersedia dan tinggal bagaimana

memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

2. Tahap Sosialisasi pemberdayaan masyarakat penyadaran akan potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purwasari tentunya dengan proses sosialisasi dengan masyarakat sekitar.
3. Tahap Proses pemberdayaan masyarakat Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan badan usaha milik desa dapat menghasilkan kegiatan seperti penggemukan kambing dan sebagainya.
4. Tahap Pemandirian masyarakat adanya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pengelolaan melalui pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Purwasari.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “empowerment”. Menurut Mernam Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Adisasmito, 2014:151) kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: 1) to give power atau authorityto atau memberi kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya.

Kata empowerment berasal dari kata dasar empower yang berarti to invest with power, especially legal power or

officially authority atau to equip or supply with an ability. Jadi pemberdayaan diartikan menguasai, memberikan kuasa atau memberi wewenang sehingga menjadi obyek yang berkuasa. Dalam pemberdayaan terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan dan kreativitas (Widanti, 2011:44).

Hulme dan Turner (dalam Adisasmito, 2014:152) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Dari beberapa pengertian diatas dapat dirangkum bahwa pemberdayaan adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kreativitas, kekuatan untuk mendorong suatu proses perubahan sosial kepada masyarakat yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh terhadap arena politik.

Dalam pengertian lain menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Anwas, 2013:3).

Menurut Psoinos dan Smithson (dalam Greasley, 2004:354-368) pemberdayaan adalah sebuah persepsi dan keyakinan, sebuah posisi yang dimiliki oleh peneliti yang mengambil perspektif pengalaman pada arti pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah

pengalaman peneliti yang diyakini dapat memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya diri dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

Begitu juga Suparjan dan Hemptri Suyatno (2003:44) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (community awareness). Diharapkan dengan adanya kesadaran komunitas ini dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memandirikan masyarakat dengan memberikan kemampuan, keterampilan dan kreativitas dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (pusat kajian dinamika dansistem pembangunan, 2007:4). Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa didirikan dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Untuk itu, BUM Desa dimaksudkan agar keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Keberadaan dan kinerjanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat ciri-ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:4).

BUM Desa merupakan suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri. Dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUM Desa, modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa yang selanjutnya mendapat

penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa. Ada beberapa tujuan pendirian BUM Desa, diantaranya.

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Untuk itu, perlu upaya yang serius untuk pengelolaan BUM Desa agar mampu berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan suatu negara tidak lepas dengan namanya sumberdaya (resources), baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Kedua sumberdaya ini sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia menjadi aset penting dalam pembangunan suatu negara. Banyak negara yang kaya akan sumberdaya alam akan tetapi kurang memperhatikan sumberdaya manusia, sehingga negara akan sulit untuk menjadi negara maju karena tidak dapat memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki (Notoatmodjo, 1998:1).

Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia sangat berpengaruh penting dalam pembangunan suatu negara. Kuantitas menyangkut jumlah sumberdaya manusia yang kurang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara jika dibandingkan dengan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya menyangkut mutu kemampuan manusia, baik

kemampuan fisik (bekerja, berpikir, dan terampil) maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental).

Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dapat diarahkan kedua aspek tersebut aspek fisik dan non fisik. Meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi, sedangkan dalam meningkatkan kualitas non fisik dapat dilakukan dengan upaya pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumberdaya manusia. Dalam Pengembangan sumberdaya masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, pengembangan sumberdaya manusia secara makro dan pengembangan manusia secara mikro. Pengembangan manusia secara makro diartikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Sedangkan secara mikro merupakan proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga untuk mencapai hasil optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Seleksi Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwasari

Pada tahap seleksi lokasi mengacu pada tempat yang dipilih memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga pentingnya kesadaran terhadap potensi sumber daya alam yang telah tersedia dan tinggal bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dalam hal ini pemerintah desa dapat memilih lokasi untuk penyelenggaraan pelatihan penggemukan kambing di Desa Purwasari.

Program bumdes saat ini mengalokasikan pemberdayaan pada usaha peternakan yaitu penggemukan kambing. Lokasi strategis yang dijadikan tempat penggemukan kambing oleh pemerintah di dusun 2 kampung sadang tepatnya di RT 06 RW 03, seperti yang diungkapkan oleh bapak Suherman.

“Untuk konteks pemberdayaan melalui program bumdes saat ini pengalokasian pemberdayaan melalui peternakan yaitu penggemukan kambing yang dilaksanakan di lokasi desa purwasari yang terletak di dusun 2 kampung sadang itu tepatnya ada di RT 06 RW 03 untuk saat ini untuk pelaksanaan pemberdayaan penggemukan kambing.” (Kantor Desa Purwasari, Jumat, 11 Maret 2022)

Dalam proses pemilihan lokasi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama melalui bidang usaha bumdes, tahap kedua melalui musyawarah khusus internal bumdes dan lingkungan itu sendiri hasil daripada musyawarah desa khusus. Dari ketiga tahapan tersebut kepala desa dapat memutuskan lokasi pemberdayaan penggemukan kambing di desa purwasari.

Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwasari

Pada tahap sosialisasi perlunya penyadaran akan potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purwasari tentunya dengan proses sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pemerintah desa purwasari berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi pelatihan agar

masyarakat mengikuti proses pelatihan dari awal sampai akhir.

Pemerintah desa purwasari dalam hal sosialisasi melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) kepada pengurus lingkungan, ketua RT, dan ketua RW. Kemudian, disosialisasikan kepada masyarakat yang ikut andil dalam hal pemberdayaan penggemukkan kambing. Tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dalam merespon dan mendukung. Hal ini karena pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan mengundang kepada ahlinya dibidang peternakan dan pertanian, seperti yang diungkapkan oleh bapak suherman.

“Kaitan dengan partisipasi masyarakat karena hal ini konteks usaha milik desa itu secara internal ada di bumdes kita tetap mensosialisasikan terkait pemberdayaan ini dan konteks antusiasme terkait pemberdayaan ini masyarakat alhamdulillah merespon dengan baik. merespon dan mendukung terkait pemberdayaan ini, adapun kaitan dengan bidang pemberdayaan ini kita ambil hasil daripada tupoksinya sendiri atau diberikan kepada ahlinya dibidang peternakan, pertanian.” (Kantor desa, Jumat, 11 Maret 2022).

Namun, pada kenyataannya masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa purwasari. Seperti yang diungkapkan oleh kang Uce. Ketidaksesuaian pernyataan antara pemerintah dengan masyarakat desa yang merupakan hambatan dalam koordinasi yang perlu dievaluasi oleh pemerintah.

Pemerintah desa Purwasari dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan sistem skala prioritas kepada

masyarakat yang akan diperdayakan sesuai dengan bidang-bidang yang ada dilingkungan dengan apa yang mereka inginkan.

Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwasari

Dalam tahap ini pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan badan usaha milik desa dapat menghasilkan kegiatan seperti penggemukkan kambing dan sebagainya. Dalam proses pemberdayaan pemerintah desa menyarankan kepada masyarakat untuk mengikuti proses pelatihan sampai akhir karena pemerintah memberikan sertifikasi kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suherman.

“untuk konteks pelatihan kita sarankan kepada masyarakat karena ini ada sertifikasi juga dari pihak instansi yang memberikan kepada pihak masyarakat desa, alhamdulillah mereka antusias mengikuti sampai akhir sampai dapat sertifikasi.” (Kantor desa, Jumat, 11 Maret 2022).

Pemerintah desa Purwasari berkolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melakukan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana berupa posyandu, balai musyawarah ataupun Gedung serbaguna. Selain itu pemerintah desa mengungkapkan hambatan dalam proses pemberdayaan yaitu kurangnya komitmen masyarakat untuk mengembangkan kembali usaha penggemukkan kambing, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pemberdayaan itu sendiri.

Tahap Pemandirian Masyarakat Desa Purwasari

Pada tahap pemndirian BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pengelolaan melalui pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Purwasari.

Pemerintah desa purwasari berusaha membina masyarakatnya untuk mengembangkan kembali dan menyalurkan hasil dari pemberdayaan tersebut melalui perusahaan, contohnya hasil dari penggemukan kambing ditawarkan ke perusahaan untuk dijadikan hewan qurban ataupun hewan yang dapat diberdayakan kembali oleh perusahaan. Selain itu, tingkat kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kembali usaha dari hasil pelatihan sekitar 70% melalui UMKM. Hal tersebut disebabkan Sebagian masyarakat tidak mengembangkan kembali karena penghasilan dari usaha penggemukkan kambing sangat sedikit dan memilih profesi lain yang menjanjikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak C.

“kalau saya tidak mengembangkan kembali, karena profesi ini tidak menjanjikan buat saya karena penghasilannya yang kurang.”
(tempat pemberdayaan penggemukan kambing, Jumat 11 Maret 2022.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa di desa Purwasari peran pemerintah desa menurut teori Tim Delivery belum dapat dikatakan optimal di semua tahapan. Hanya dalam beberapa tahap saja. Pertama, untuk Tahap Seleksi Lokasi sudah cukup baik karena adanya musyawarah khusus terlebih dahulu untuk menentukan lokasi.

Kedua, Tahap Sosialisasi pemerintah desa kurang optimal karena sebagian masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa purwasari. Ketiga, Tahap Proses Pemberdayaan pemerintah desa cukup optimal karena pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana berupa posyandu, balai musyawarah ataupun Gedung serbaguna. Keempat, Tahap pemandirian sudah cukup optimal, pemerintah desa sudah baik karena membina masyarakatnya untuk mengembangkan kembali dan menyalurkan hasil dari pemberdayaan tersebut melalui perusahaan, contohnya hasil dari penggemukan kambing.

Saran

Pemerintah desa purwasari disarankan untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam usaha penggemukkan kambing sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa purwasari.

DAFTAR PUSTAKA

- Prio Tri Isyanto, 2017. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Gogik Kecamatan Ugaran Barat Kabupaten Semarang.** Universitas Negeri Semarang 2017.
- Rani Wahyuningsih. 2021, **Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu.** Publika. Volume 9

- Nomor 2 Tahun 2021, 323-334.
Universitas Negeri Surabaya.
- Assiyah, R. (2008). Potensi dan pengembangan wisata desa ngablak di sleman yogyakarta. Skripsi. Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Handayani, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Akademi Manajemen Pemerintahan YKPN.
- Windasari, W, Said, MM, & Hayat, H (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep). Respon Publik, riset.unisma.ac.id, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15354>
- Budiono, Pugh. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Dalam Jurnal Politik Muda (JPM), Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret 2015.
- Sumadi, dkk., Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)
- Kessa, Wahyudin. 2015. Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementrian Pembengunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Laily, Elida Imro'atin Nur. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3 Nomor 3 September-Desember 2015.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.